

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN SURVEI
PERSEPSI KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI
KAB. KEDIRI KELAS 1A**

**TRIWULAN III
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

BABI	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LatarBelakang.....	1
1.2. MaksudDanTujuan	2
1.3. LandasanHukum	2
1.4. RencanaKerja.....	3
BABII	4
METODOLOGI	4
2.1. MetodePenelitian.....	4
2.2. PopulasiDanSampel	4
2.3. Lokasi Penelitian DanUnitAnalisis.....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data DanQualityControl.....	5
2.5. TeknikAnalisisData	5
2.6. Tahapanpelaksanaan	6
BABIII	8
INDEKSPERSEPSIKORUPSI	8
3.1. Profilresponden.....	8
3.2. Indeks persepsi korupsiperindikator	9
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerjapadapengadilan.....	14
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.....	15
BABIV	17
PENUTUP	17
4.1. Kesimpulan.....	17
4.2. Rekomendasi	17
LAMPIRAN	
KUESIONER	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, telah disusun Laporan Survey Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Kab.Kediri Kelas IA TRIWULAN III tahun 2022 ini.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan public yang berorientasi wilayah bebas dari korupsi adalah dengan melakukan Survey Persepsi Korupsi kepada pengguna layanan pengadilan. Dalam survey ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner yang diisi tanpa melakukan tatap muka. Survey dilakukan kepada para pengunjung dan pengguna layanan Pengadilan Negeri Kab.Kediri Kelas IA.

Sebagai pertanggungjawaban atas Kinerja Tim Survey maka disusun laporan ini yang dimaksud untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Kab.Kediri Kelas IA mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil Survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Kab.Kediri Kelas IA dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan Pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujudnya wilayah bersih dari korupsi.

Demikian Laporan Survey Persepsi Korupsi pada pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas IA semester II tahun 2022 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Pembina Pembangunan Zona Integritas
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Kediri, 11 Oktober 2022
Ketua Tim.

ASEP KOSWARA, SH., MH.
NIP. 19681208 100403 1 001

H. RADEN WIYONO., SH., MH.
NIP. 19630703 198803 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LatarBelakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- PenetapanPelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- PenyiapanBahan
 - a. Kuesioner melalui aplikasi siSUPER.
 - b. Bagian dariKuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapanperalatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. JumlahResponden.
 - b. Lokasi dan Waktu PengumpulanData.
- PenyusunanJadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalamkuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telahdisediakan.
- Pengujian kualitas dan validitasdata.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitasresponden.

1.4.3. MetodeSurvei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

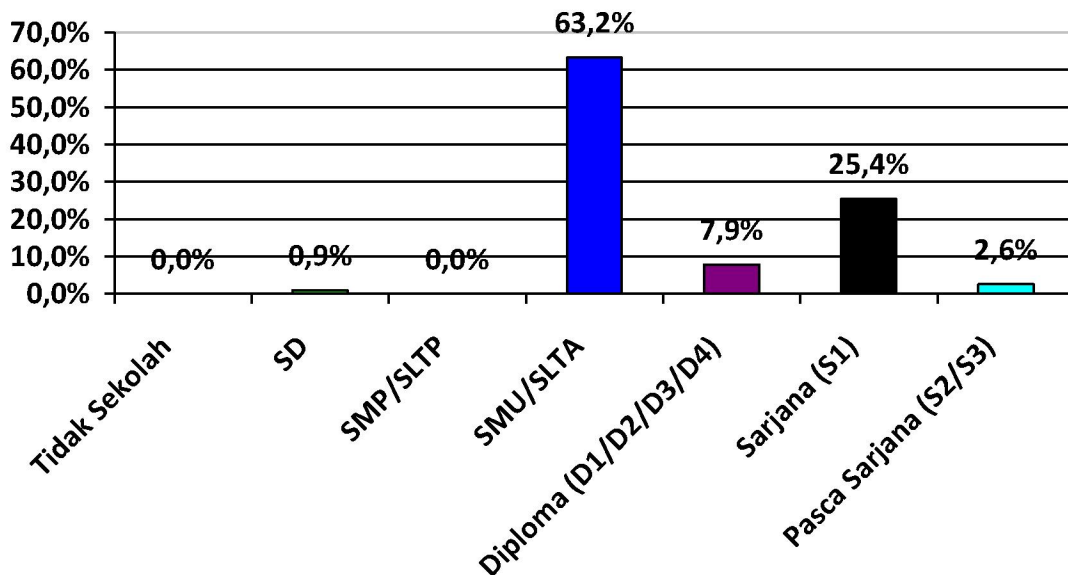
3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki terakhir SLTA adalah 72 responden dengan persentase 63,2 %.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	1	0,9
3	SMP / SLTP	0	0
4	SMU / SLTA	72	63,2
5	Diploma (D1/D2/D3/D4)	9	7,9
6	Sarjana (S1)	29	25,4
7	Pasca Sarjana (S2/S3)	3	2,6
Jumlah		114	100.0

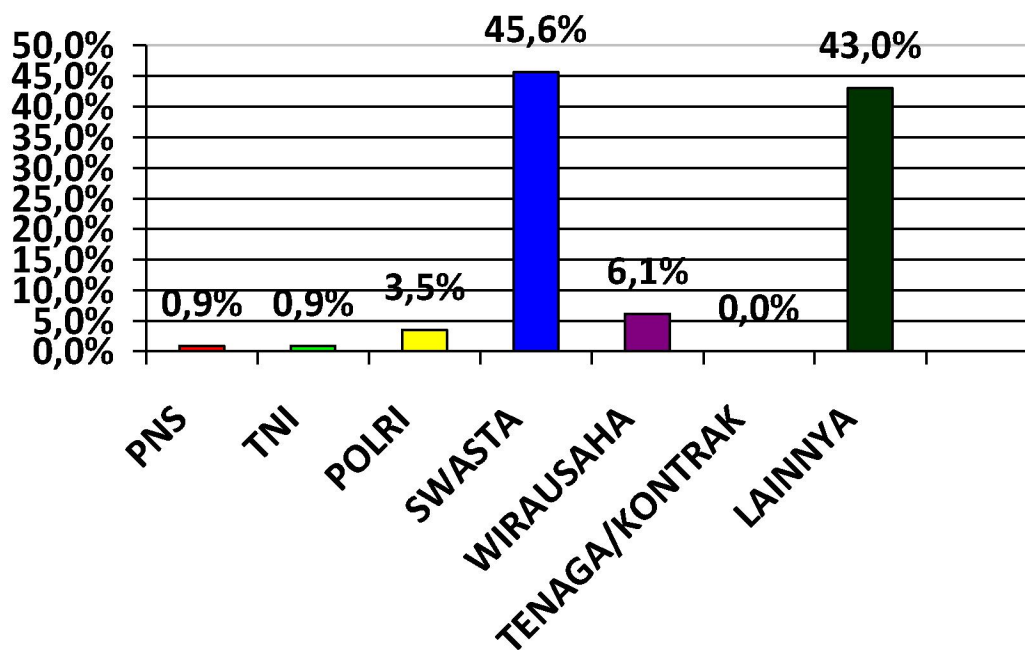


3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 45,6 % responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan sebagai Swasta.

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	1	0,9
2	TNI	1	0,9
3	POLRI	4	3,5
4	SWASTA	52	45,6
5	WIRSAUSAHA	7	6,1
6	TENAGA KONTRAK	0	0,0
7	Lainnya	49	43,0
Jumlah		114	100,0

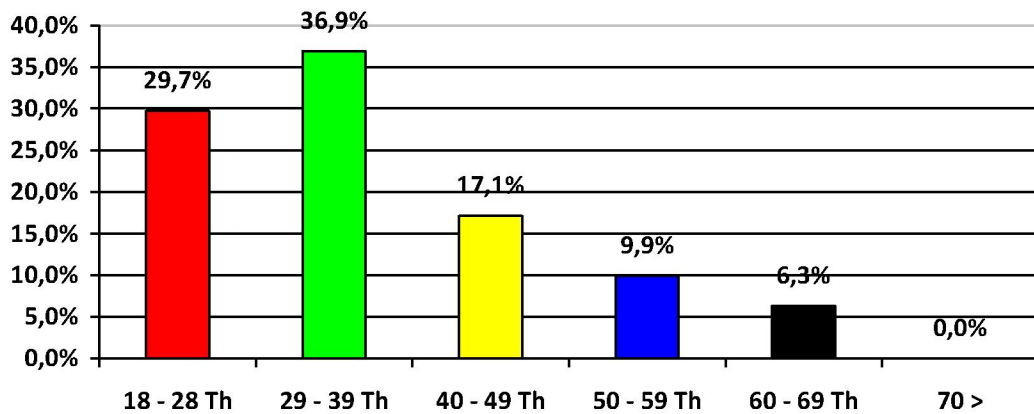


3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 20 tahun s/d 30 tahun. Bagi kelompok usia di atas 41 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 31 tahun.

Tabel 6.
Usia responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	18 – 28 Th	33	29,7
2	29 – 39 Th	41	36,9
3	40 – 49 Th	19	17,1
4	50 – 59 Th	11	9,9
5	60 - 69 Th	7	6,3
6	70>	0	0
Jumlah		114	100.0



3.2. Indeks persepsi korupsi perindikator.

3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

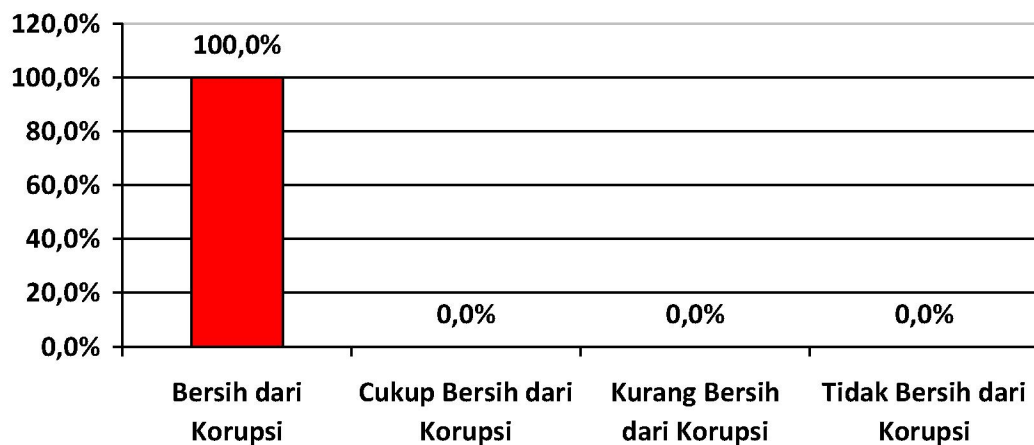
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4,000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari manipulasi peraturan.

Tabel 7.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	114	100,0
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	0,0
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			114	100.0



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan.

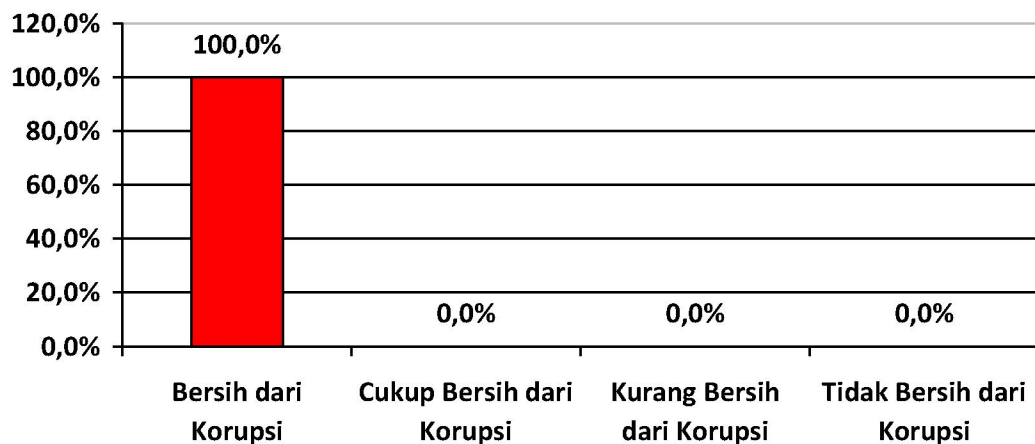
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4,000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 8.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	114	100,0
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	0,0
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			114	100,0



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh.

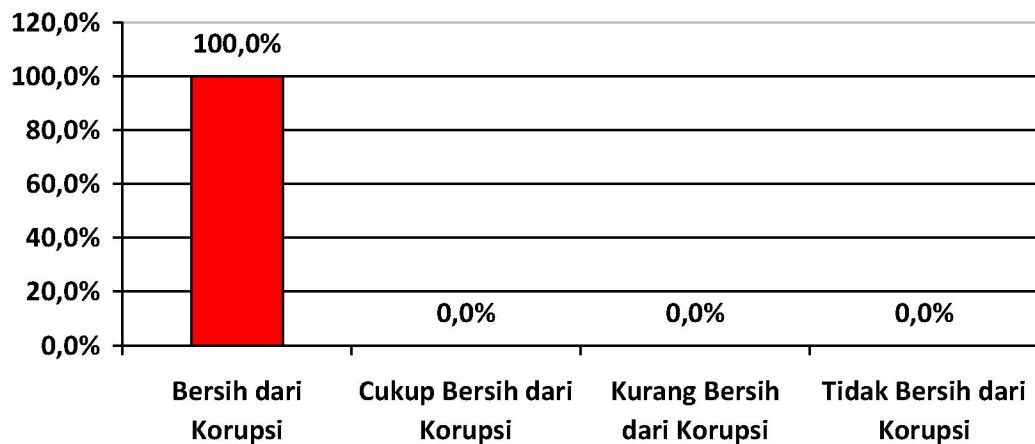
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4,000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dan tidak ada yang menjual pengaruh di satuankerja.

Tabel 9.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	114	100,0
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	0,0
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			114	100.0



3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

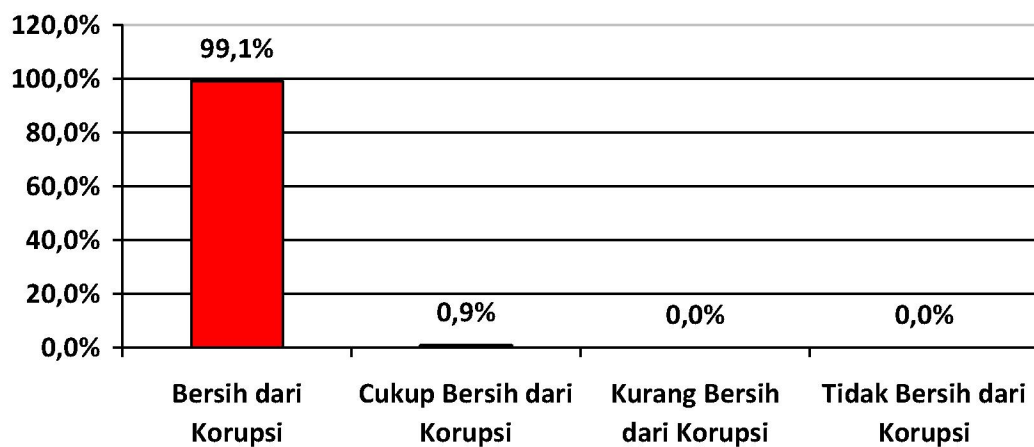
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,991

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak ada transaksi rahasia.

Tabel 10.

Tabel indeks pada indikator transaksi biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	113	99,1
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	1	0,9
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			114	100.0



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

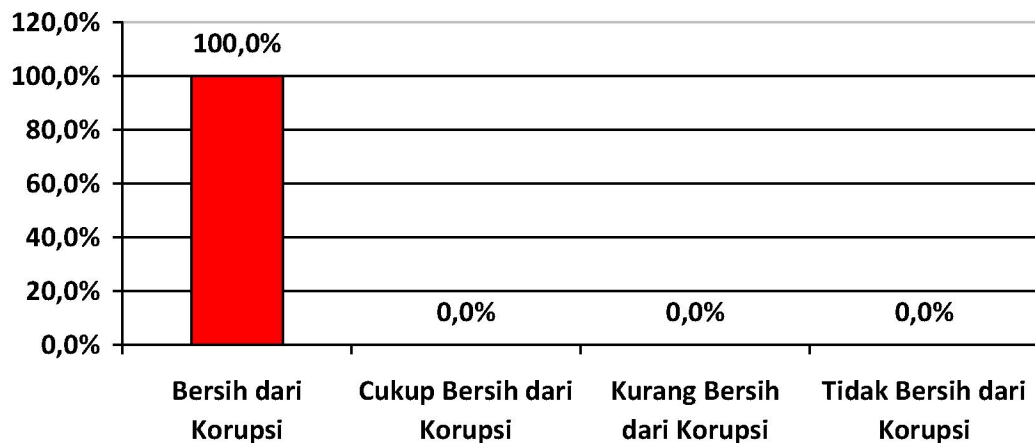
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4,000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menerapkan adanya biaya tambahan.

Tabel 11.

Indeks pada indikator biaya tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	114	100,0
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	0,0
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			114	100.0

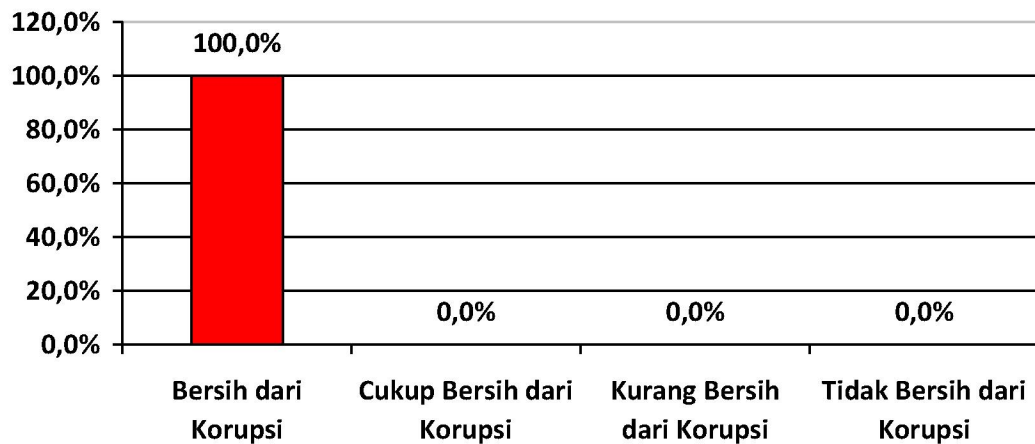


3.2.6. Indikator Hadiah.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4,000 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menerima hadiah dari pihak manapun.

Tabel 12.
Indeks pada indikator hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	114	100,0
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	0,0
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			114	100.0



3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

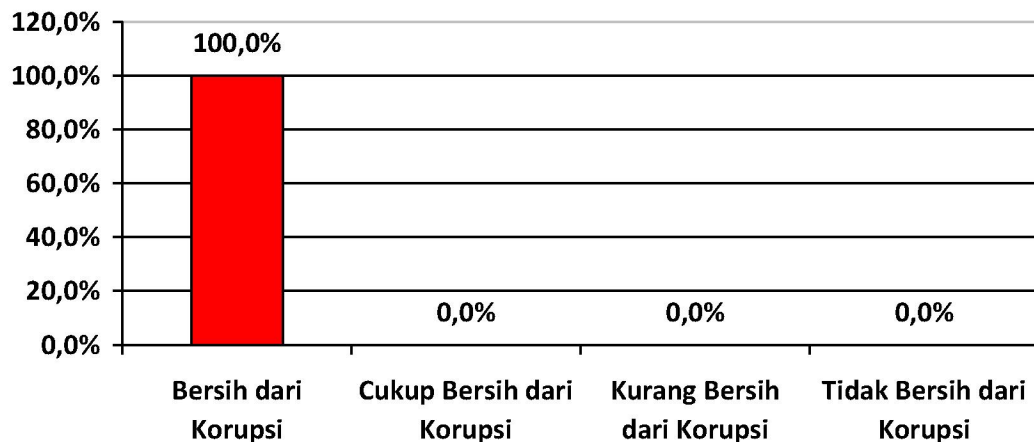
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4,000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan transparan dalam pengelolaan pembiayaan.

Tabel 13.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	114	100,0
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	0,0
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			114	100.0

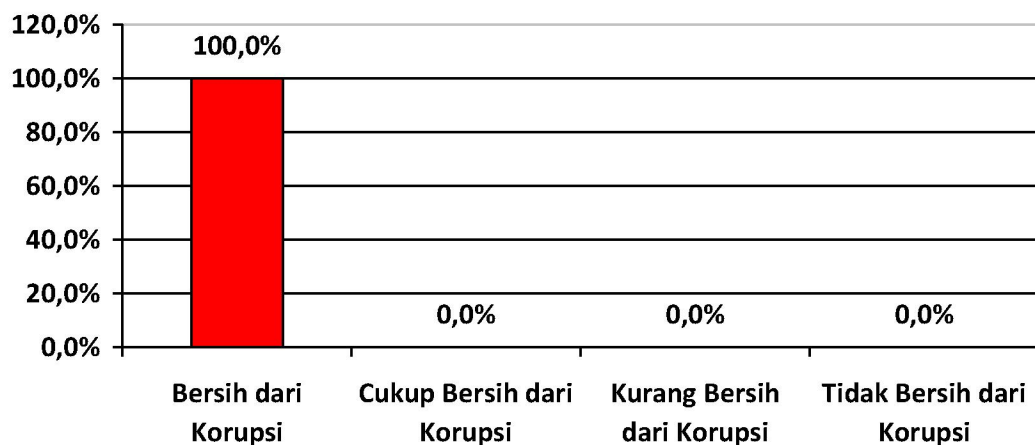


3.2.8. Indikator Percaloan.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,000 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 14.
Indeks pada indikator percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	114	100,0
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	0,0
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			114	100.0



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang.

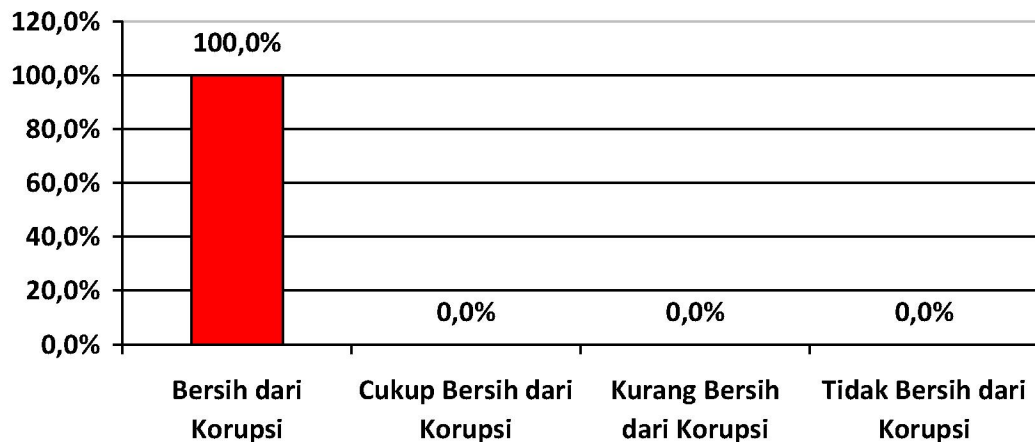
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4,000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari perbuatan curang.

Tabel 15.

Indeks pada indikator perbuatan curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	114	100,0
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	0,0
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			114	100.0



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia.

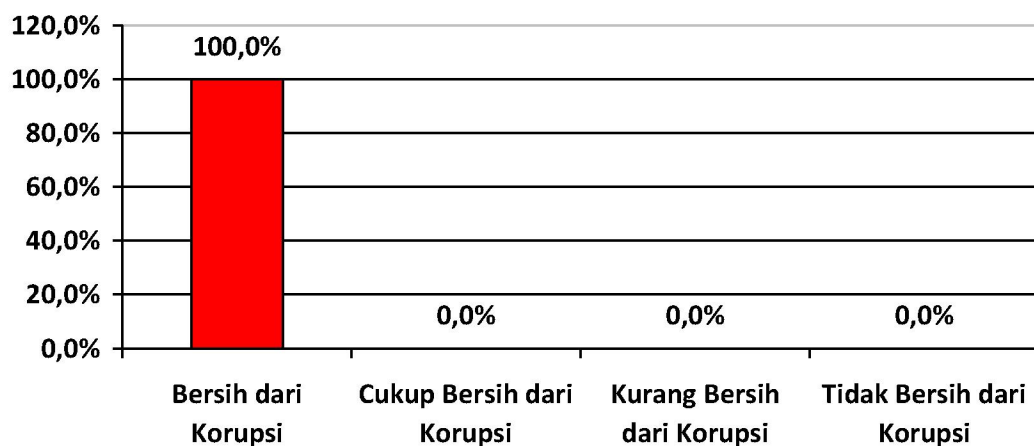
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4,000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari adanya benturan kepentingan.

Tabel 16.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Bersih dari Korupsi	4	114	100,0
2.	Cukup Bersih dari Korupsi	3	0	0,0
3.	Kurang Bersih dari Korupsi	2	0	0,0
4.	Tidak Bersih dari Korupsi	1	0	0,0
Jumlah			114	100.0



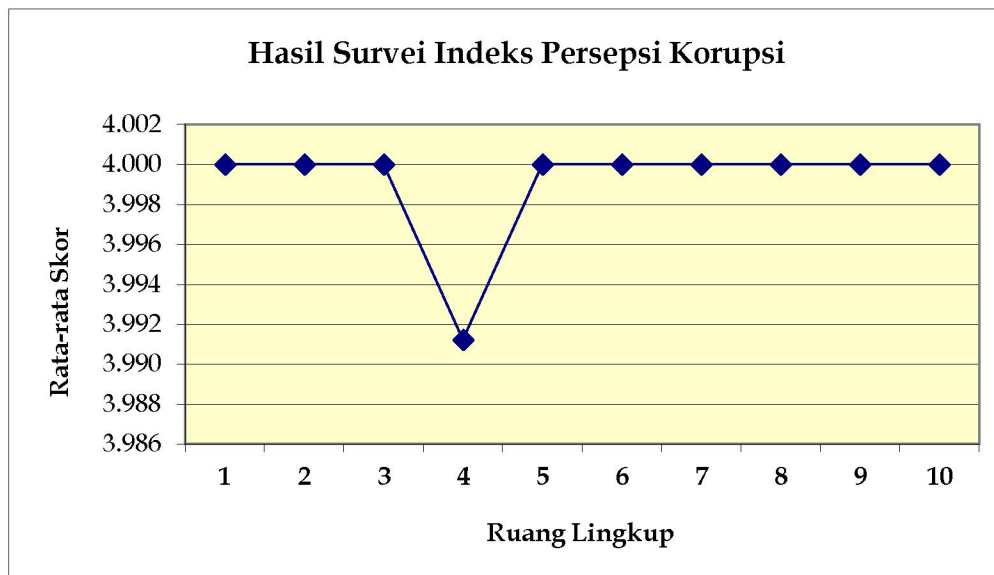
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kab. Kediri sebesar 93,27.

Tabel 17.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri

Ket	Indikator											
	Manipulasi Peraturan	Penyalahgunaan Jabatan	Menjual Pengaruh	Transaksi Biaya	Biaya Tambahan	Hadiah	Transparansi Biaya	Percalaan	Perbuatan Curang	Transaksi Rahasia		
Jumlah	456	456	456	455	456	456	456	456	456	456	456	
NRR per RL	4,000	4,000	4,000	3,991	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
NRR Tertimbang	0,400	0,400	0,400	0,399	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	4,000
NILAI PERSEPSI KORUPSI												99,98



Indeks 99,98 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26 – 100,00

Tabel 18.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Kab. Kediri

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidakbersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari Korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 19.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri
1	Agar biaya yang diperlukan untuk setiap jenis pelayanan bisa diakses secara publik dan transparan
2	Agar informasi perkara secara online lebih

	disosialisasikan.
3	Agar prosedur pelayanan lebih diperjelas.
4	Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang dikenakan agar lebih ditekankan.
5	Agar syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, bisa lebih dipermudah.
6	Agar penegakan hukum dalam penanganan korupsi lebih ditingkatkan.

3.5. Hasil Survei Kualitatif

Hasil survei kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil saran-saran responden yang ditulis di dalam angket yang telah disebar. Saran-saran perbaikan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IA, yang diusulkan responden, adalah sebagai berikut :

1. penjelasan sangat dimengerti.
2. petugas informasi sangat ramah.
3. Petugas menjelaskan persyaratan sangat jelas.
4. ramah dan akuntable.
5. Ramah dan terbuka.
6. Pelayanan sangat ramah.
7. Pelayanan sangat ramah.
8. Pelayanan sangat cepat.
9. Pelayanan sangat cepat.
10. RAMAH DAN TERBAIK.
11. RAMAH ;
12. RAMAH DAN AKUNTABLE.
13. Pelayanan sangat baik.
14. Pelayanan sangat baik.
15. Pelayanan sangat ramah ;
16. ramah dan cepat .

17. terbaik .
18. Ramah
19. Pelayanannya maksimal dan karyawannya 3S ,sapa,senyum, Salam Dan ramah-ramah ;
20. RAMAH .
21. BAIK .
22. RAMAH DAN SOPAN .
23. PELAYANNYA BAIK ;
24. Kepegawaian pada bagian hukum sangat baik ;
25. Kepegawaian pada bagian Hukum sangat baik .
26. aKepegawaian pada bagian Perdata sangat baik.
27. Kepegawaian pada perdata sangat baik.
28. Kepegawaian pada Perdata sangat baik.
29. Kepegawaian pada bagian Perdata sangat baik.
30. Kepegawaian pada bagian Hukum sangat baik dan bagus.
31. Pegawai nya sangat ramah.
32. Pelyanan pada bagian Hukum sangat baik.
33. Pegwai pada bagian Umum sangat ramah dan sopan.
34. Kegiatan Permohonan sangat mudah ;.
35. RAMAH DAN AKUNTABLE
36. BAIK DAN RAMAH.
37. RAMAH DAN TERBAIK.
38. terbaik dan ramah.
39. ramah dan senyum.
40. ramah dan cepat.
41. terbaik.. .
42. Pengambilan SalinanPutusan mudah.
43. Orang pada pelayanan Keperdataan sangat ramah.
44. Pengajuan persyaratan perwalian.
45. Pengurusannya mudah
46. BAIK DAN RAMAH.
47. baik dan ramah.

48. ramah dan akuntable;
49. Pengurusan Legalisir sangat mudah;
50. Pelayanan pada bagian PTSP Umum sangat baik dan ramah, sehingga tamu mendapatkan kepuasan pelayanan yang baik.
51. Pegawai di bagian Kepaniteraan Hukum sangat baik dan ramah.
52. Saran dan Prasarana di bagian Perdata sangat baik
53. Pengajuan Legalisir sangat mudah dilakukan.
54. pelayannya oke;
55. ramah dan baik.
56. pelayannya baik.
57. SOPAN.
58. Mantap ;.
59. BAIK DAN SOPAN.
60. TERBAIK.
61. TERBAIK ;.
62. PELAYANAN BAIK, PETUGAS RAMAH.
63. PELAYANAN BAIK.
64. PEPELAYANAN BAIK.
65. Pegawainya sangat ramah.
66. Kepengurusan Legalisir cepat dan tepat.
67. Pelayanan nya sangat Cepat dan Tepat di bagian perdata.
68. pengurusan berkas perbaikan sangat baik
69. Pengurusan sangat Responsif ;.
70. Pelayanan di PTSP khususnya di bagian Perdata, semua pegawai nya sudah baik;
71. Pengurusan baik.
72. Pelayanan bidang umum sangat baik.
73. etiap proses sidang nya dilakukan dengan bersih dan melayani.
74. RAMAH DAN CEPAT.
75. SABAR DAN RAMAH.
76. BAIK DAN CEPAT.

77. TERBAIK.
78. oke.
79. sampuni.
80. oke.
81. oke.
82. mantap.
83. oke.
84. oke.
85. oke.
86. mantap.
87. oke.
88. mantap.
89. oke.
90. sip.
91. sip
92. mantap.
93. makasih.
94. sip
95. sampun.
96. sampun;
97. mantap.
98. sipp.
99. BIROKRASI CEPAT DAN TANGGAP.
100. RAMAH DAN CEPAT.
101. SATPAMNYA RAMAH DAN INFORMASINYA CEPAT LUGAS.
102. petugas ramah.
103. mengajukan permohonan gugatan sangat mudah.
104. pengambilan surat putusan sidang cepat.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kab.Kediri diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri memiliki Indeks Persepsi Korupsi 99,98 **atau** masuk pada kategori BERSIH DARI KORUPSI

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,000
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,000
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,991
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,000
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,000
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,000
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,000
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,000
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas 1A Tahun 2022 bulan Juli s/d September tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 99,98 atau masuk pada persepsi 81,26 – 100,00 Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

146											
147											
148											
149											
150											
Jumlah	456	456	456	455	456	456	456	456	456	456	
NRR per RL	4.000	4.000	4.000	3.991	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
NRR Tertimbang	0.400	0.400	0.400	0.399	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	3.999
NILAI PERSEPSI KORUPSI											99.98

Keterangan :

- RL = Ruang Lingkup Persepsi Korupsi
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Persepsi Korupsi
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per RL = Jumlah nilai per Indikator dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per Indikator x (1/10)

INDEKS PERSEPSI KORUPSI : 99.98
Kategori: BERSIH DARI KORUPSI

Nilai Persepsi Korupsi :

- 4 (Bersih dari Korupsi) : 81,26 - 100,00 : 3,26 - 4,00
- 3 (Cukup Bersih dari Korupsi) : 62,51 - 81,25 : 2,51 - 3,25
- 2 (Kurang Bersih dari Korupsi) : 43,76 - 62,50 : 1,76 - 2,50
- 1 (Tidak Bersih dari Korupsi) : 25,00 - 43,75 : 1,00 - 1,75

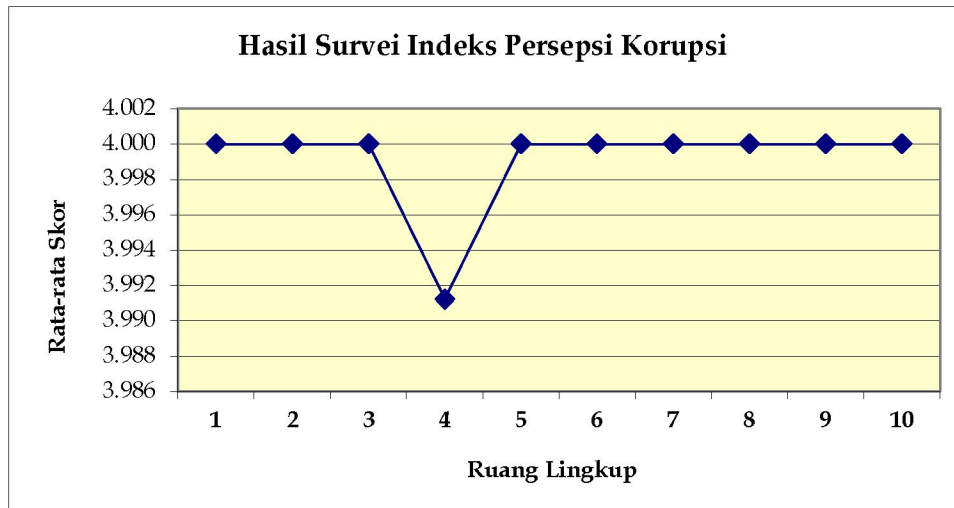
Tabel

RINGKASAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI

	Survey Indeks Persepsi Korupsi:
	99.98 Kategori: BERSIH DARI KORUPSI

Nomor	Ruang Lingkup / Indikator	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	4.000	Sangat Baik	1
2	Penyalahgunaan Jabatan	4.000	Sangat Baik	1
3	Menjual Pengaruh	4.000	Sangat Baik	1
4	Transaksi Biaya	3.991	Sangat Baik	10
5	Biaya Tambahan	4.000	Sangat Baik	1
6	Hadiah	4.000	Sangat Baik	1
7	Transparansi Biaya	4.000	Sangat Baik	1
8	Percaloan	4.000	Sangat Baik	1

9	Perbuatan Curang	4.000	Sangat Baik	1
10	Transaksi Rahasia	4.000	Sangat Baik	1



KETUA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

KETUA TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI

RUDITA SETYA HERMAWAN, SH., MH.
NIP. 19780617 200112 1 002

H. RADEN WIYONO, SH., MH.
NIP. 19630703 198803 1 003

**PEMBINA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI**

ASEP KOSWARA, SH., MH.
NIP. 19681208 199403 1 001

ANALISIS DATA SPAK TRIWULAN III
BULAN JULI – SEPTEMBER TAHUN 2022
DENGAN NILAI INDEKS 4,00 / 99,98 %

Frequency Table

VAR00001

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4.00	114	100.0	100.0	100.0

VAR00002

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4.00	114	100.0	100.0	100.0

VAR00003

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4.00	114	100.0	100.0	100.0

VAR00004

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	1	.9	.9	.9
4.00	113	99.1	99.1	100.0
Total	114	100.0	100.0	

VAR00005

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4.00	114	100.0	100.0	100.0

VAR00006

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4.00	114	100.0	100.0	100.0

VAR00007

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4.00	114	100.0	100.0	100.0

VAR00008

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4.00	114	100.0	100.0	100.0

VAR00009

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4.00	114	100.0	100.0	100.0

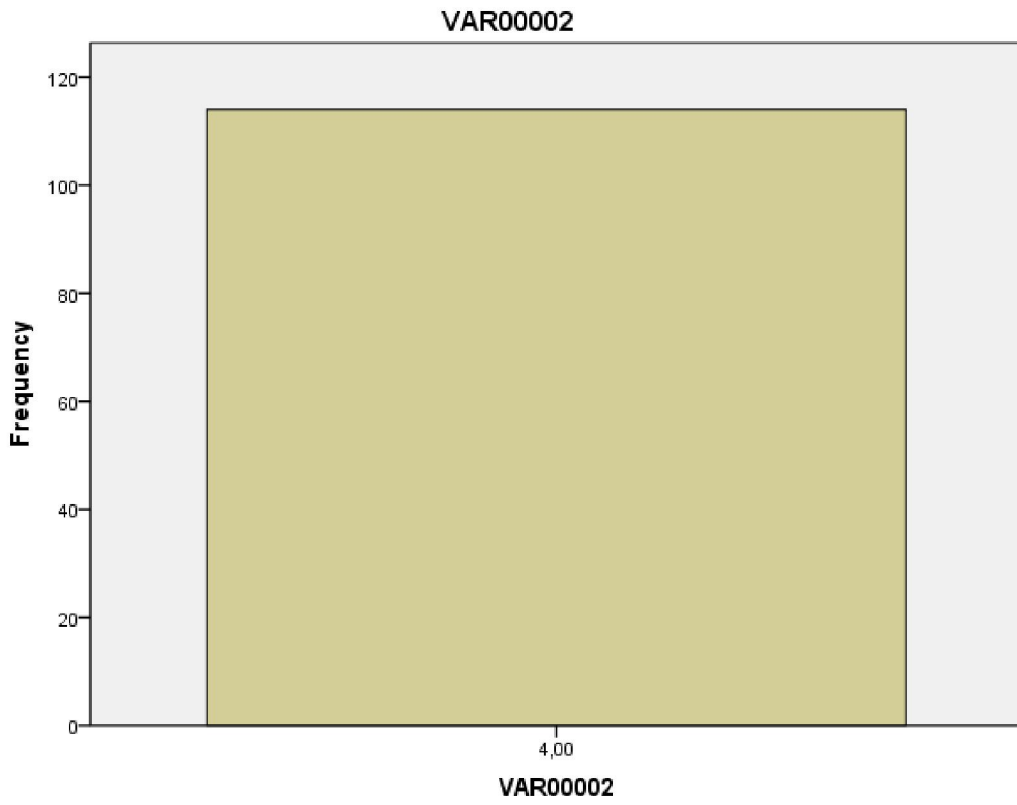
VAR00010

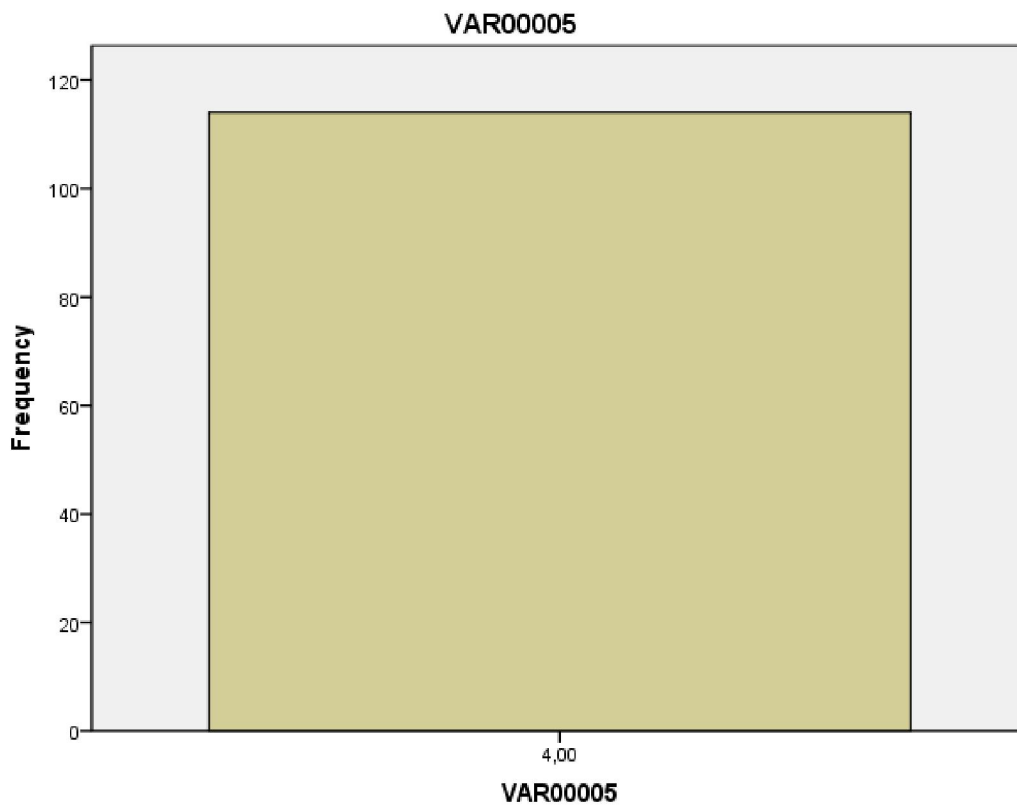
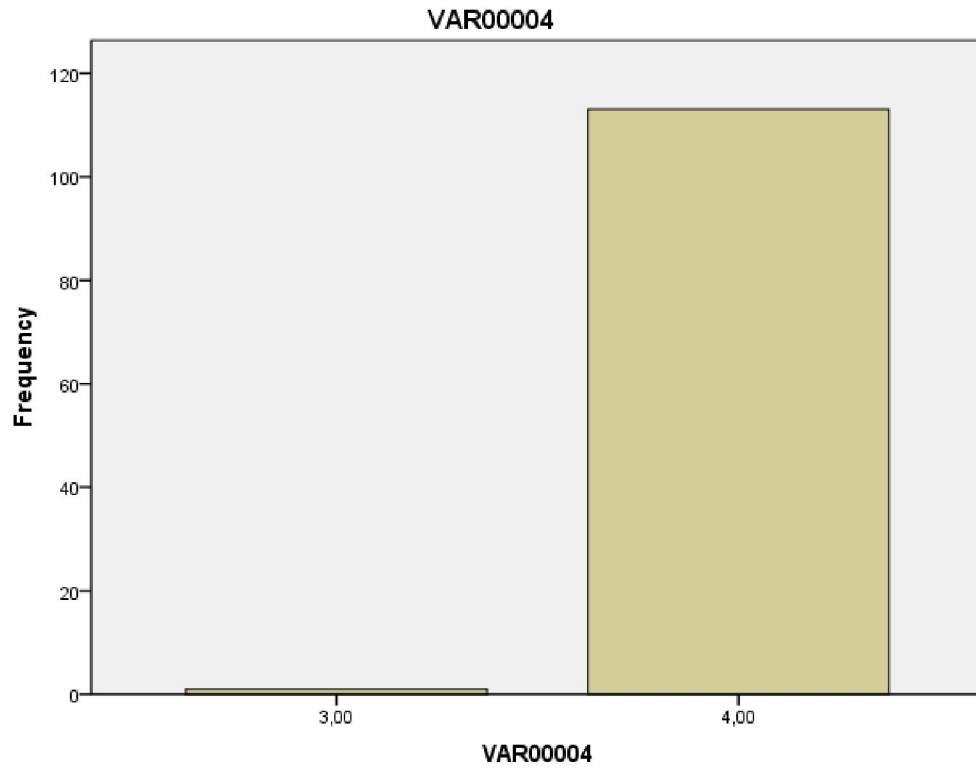
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4.00	114	100.0	100.0	100.0

Bar Chart

VAR00001



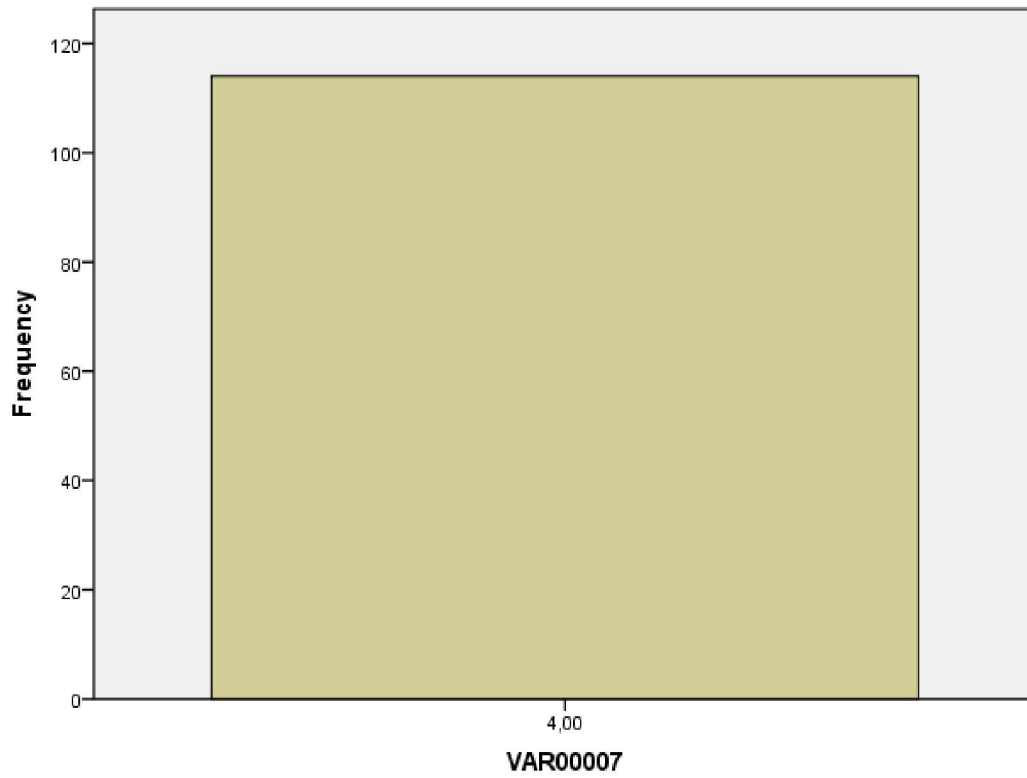


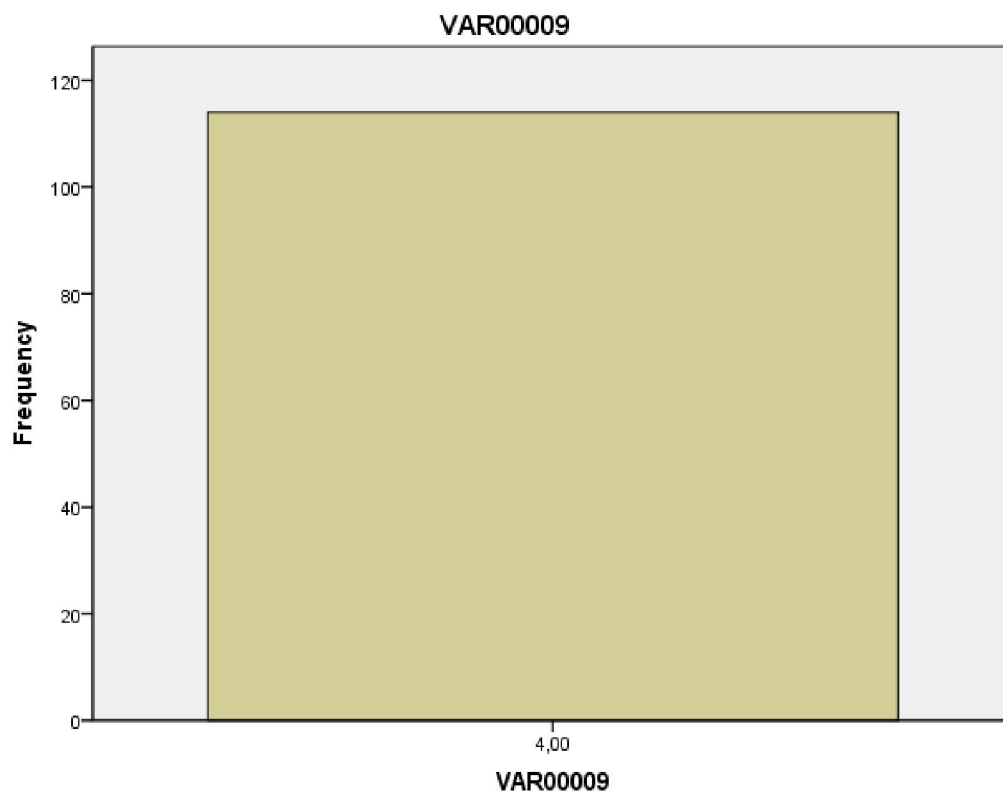
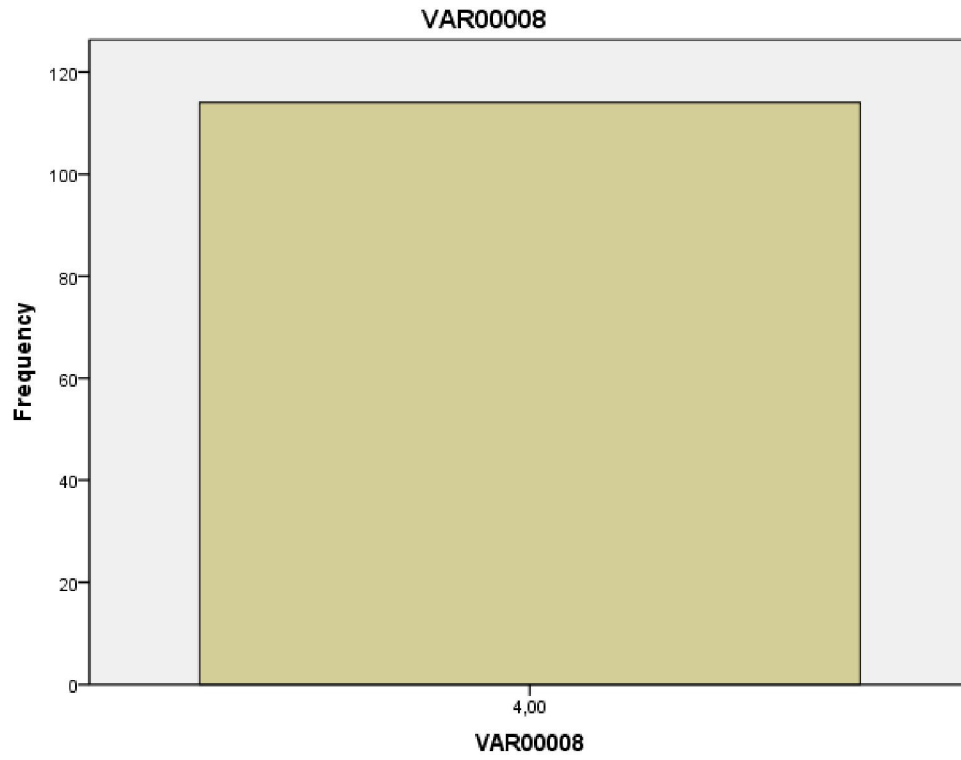


VAR00006



VAR00007





VAR00010

